



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Untuk memberikan arahan dan acuan dalam penanganan dan pelaksanaan untuk mencapai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dan penataan ruang Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang akan menjadi bahan evaluasi di tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai tolak ukur dalam melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan serta Menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk memahami dan monitoring arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika Renja Tahun 2023.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Strategis Dinas, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan hasil telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut yang pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANA RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA 2019-2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 ditujukan untuk Mengidentifikasi Sejauh Mana Kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam Melaksanakan Program dan Kegiatannya, Mengidentifikasi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan, serta Hambatan Permasalahan yang dihadapi.

Jenis Program Dan Kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku

1	03	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	03	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	2.00		
1	03	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 dokumen	5.00		
1	03	01	1	03		Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-						
1	03	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	2.00		
1	03	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
1	03	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100%	-	2 paket	1.00		
1	03	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	3.00		
1	03	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	19 Orang	67 orang	1.79		
1	03	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					-						
1	03	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Komponen Listrik	31 Komponen Listrik	27 Komponen Listrik	27 Komponen Listrik	100%	3 Komponen Listrik	61 Komponen Listrik	2.26		
1	03	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Komponen	5 Komponen	5 Komponen	5 Komponen	100%	5 Komponen	15 komponen	2.00		

1	03	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Sambungan	16 sambungan	11 Sambungan	11 Sambungan	100%	3 Sambungan	30 sambungan	30.00
1	03	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Sambungan	-	1 Sambungan	1 Sambungan	100%	3 Sambungan	4 sambungan	4.00
1	03	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	79 Orang	24 orang	79 Orang	79 Orang	100%	160 Orang	263 orang	3.33
1	03	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	20 Orang	30 orang	3.00
1	03	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	03	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	12 unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	42 unit	2.80
1	03	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 unit	2.00
1	03	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 unit	2.00
1	03	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	16 unit	2.00
1	03	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	-	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	12 unit	2.00
1	03	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	76 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	77 unit	77.00

					PERSAMPAHAN REGIONAL										
1	03	04	1	01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	03	04	1	01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Laporan	2.00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
1	03	06	1	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
1	03	06	1	01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	39 Unit	36 unit	39 Unit	39 Unit	100%	11 Unit	86 unit	2.21
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										
1	03	07	1	01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
1	03	07	1	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	54 Unit	75 unit	54 Unit	54 Unit	100%	28 Unit	157 unit	2.91
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					-					

1	03	09	1	01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1	03	09	1	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	60 Unit	-	60 Unit	60 Unit	100%	22 Unit	82 unit	1.37
1	03	09	1	01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						1 Dokumen	1 dokumen	
1	03	10				ROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN									
1	03	10	1	01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi									
1	03	10	1	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	12 dokumen	12.00
1	03	10	1	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	87,73 KM	120 KM	87,73 KM	112,285 KM	128%	3.782 KM	4014 KM	45.75
1	03	10	1	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		-		-		6 KM	6 KM	
1	03	10	1	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		-		-		10 KM	10 KM	

1	03	11	1	02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 laporan	2.00
1	03	11	1	02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	27 Orang	200 orang	27 Orang	27 Orang	100%	27 Orang	254 orang	9.41
1	03	11	1	03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi									
1	03	11	1	03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 laporan	2.00
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
1	03	12	1	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi									
1	03	12	1	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 dokumen	5.00
1	03	12	1	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 dokumen	2.00
1	03	12	1	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	3.00

5	02	02	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226 ASN	-	226 ASN	226 ASN	100%	226 ASN	452 ASN	2.00
5	02	02	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 dokumen	1.00
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	02	03	1	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5	02	03	1	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	3.00

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku**

Perangkat Daerah																				
0 3	0 1	1	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Komponen Listrik	941,501,00	31 Komponen Listrik	73,316,500	27 Komponen Listrik	150,001,00	27 Komponen Listrik	145,362,700	1 Komponen Listrik	96.91	58	218,679,200	386.67	23.23
0 3	0 1	1	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Komponen	28,200,060	-	-	5 Komponen	7,385,730	5 Komponen	5,705,700	1 Komponen	77.25	5	5,705,700	25	20.23
0 3	0 1	1	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	757,733,240	-	-	1 Paket	201,746,200	1 Paket	199,536,00	1 paket	98.90	1	199,536,00	20	26.33
0 3	0 1	1	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	314,017,106	-	-	1 Paket	127,420,263	1 Paket	107,400,141	1 paket	84.29	1	107,400,141	20	34.20
0 3	0 1	1	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	153 Dokumen	600,929,800	36 Dokumen	58,996,750	57 Dokumen	199,999,750	57 Dokumen	41,584,200	1 Dokumen	20.79	93	100,580,950	60.78	16.74
0 3	0 1	1	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Dokumen	39,934,000	-	-	5 Dokumen	9,740,000	5 Dokumen	2,999,900	1 Dokumen	30.80	5	2,999,900	31.25	7.51
0 3	0 1	1	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	179 Laporan	472,832,300	30 Laporan	-	40 Laporan	103,680,00	40 Laporan	57,988,500	1 laporan	55.93	70	57,988,500	39.11	12.26
0 3	0 1	1	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289 Laporan	3,995,459,174	65 Laporan	2,381,083,206	60 Laporan	883,424,587	60 Laporan	363,624,150	1 laporan	41.16		2,744,707,356	0	68.70
0 3	0 1	1	0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5,791,993,959	2 dokumen	1,452,024,433	1 Dokumen	1,213,326,494	1 Dokumen	1,067,457,204	1 Dokumen	87.98	1	2,519,481,637	20	43.50

					Elektronik pada SKPD															
0 3	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
0 3	0 1	1	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	1,001,344, 128,844	2 unit	1,056,984, 600	8 Unit	220,512,2 44	8 Unit	207,278,4 50	1 unit	94. 00	10	1,264,263, 050	90.9 1	0.1 3
0 3	0 1	1	0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Paket	1,369,059, 283	1 paket	386,445,3 00	8 paket	345,868,1 94	8 paket	334,328,0 27	1 paket	96. 66		720,773,3 27	0	52. 65
0 3	0 1	1	0 7	0 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1,021,553, 229	19 unit	472,403,7 50	15 unit	157,753,7 40	15 unit	135,764,4 00	1 unit	86. 06	34	608,168,1 50	45.3 3	59. 53
0 3	0 1	1	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
0 3	0 1	1	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	2,339,100, 000	16 sambungan	308,013,1 34	11 Sambungan	464,400,0 00	11 Sambungan	347,816,0 76	1 sambungan	74. 90	27	655,829,2 10	180	28. 04
0 3	0 1	1	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	209,280,0 00	-	-	1 Sambungan	52,320,0 0	1 Sambungan	35,267,30 9	1 sambungan	67. 41	1	35,267,30 9	8.33	16. 85
0 3	0 1	1	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor	595 Orang	19,125,94 7,750	24 orang	1,362,854, 130	79 Orang	2,842,160, 000	79 Orang	2,809,652, 200	1 orang	98. 86	103	4,172,506, 330	17.3 1	21. 82

						Kantor yang Disediakan														
0 3	0 1	1	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Oran g	2,255,259, 000	-	-	10 Oran g	343,179,0 00	10 Orang	310,200,0 00	1 orang	90. 39	10	310,200,0 00	13.8 9	13. 75
0 3	0 1	1	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
0 3	0 1	1	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 unit	2,566,372, 890	12 unit	223,108,6 57	15 Unit	570,708,8 00	15 Unit	162,478,3 44	1 unit	28. 47	27	385,587,0 01	36	15. 02
0 3	0 1	1	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	284,512,0 00	-	-	4 Unit	77,060,00 0	4 Unit	43,092,03 5	1 unit	55. 92	4	43,092,03 5	25	15. 15
0 3	0 1	1	0 9	0 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	16 unit	187,442,6 70	-	-	4 Unit	33,000,00 0	4 Unit	22,773,00 0	1 unit	69. 01	4	22,773,00 0	25	12. 15

0 3	0 1	1	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	239,879,300	-	-	8 Unit	34,879,300	8 Unit	33,250,000	1 unit	95. 33	8	33,250,000	25	13. 86
0 3	0 1	1	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	219,471,660	-	-	6 Unit	40,420,000	6 Unit	17,280,533	1 unit	42. 75	6	17,280,533	25	7.8 7
0 3	0 1	1	0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	3,415,389,850	76 Unit	785,893,702	1 Unit	2,322,639,850	1 Unit	1,982,956,050	1 unit	85. 38	77	2,768,849, 752	1925	81. 07
0 3	0 1	1	0 9	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	305,345,800	-	-	1 Unit	43,315,000	1 Unit	43,315,000	1 unit	100. 00	1	43,315,000	50	14. 19
0 3	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
0 3	0 2	1	0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
0 3	0 2	1	0 1	0 4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	400,000,000	-	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	97,800,450	1 Dokumen	48. 90	1	97,800,450	50	24. 45
0 3	0 2	1	0 1	0 7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	43 Titik	57,948,273,471	-	-	43 Titik	57,948,273,471	43 Titik	56,921,098,203	1 titik	98. 23	43	56,921,098,203	100	98. 23

					Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAK															
0 3	1 1	1 1	0 3	0 3	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi															
0 3	1 1	1 1	0 3	0 2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	5 laporan	8,655,349, 100	-	479,452,7 12	1 Laporan	1,999,740, 100	1 Laporan	1,755,533, 126	1 laporan	87. 79	1	2,234,985, 838	20	25. 82
0 3	1 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
0 3	1 2	1 1	0 1	0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi															
0 3	1 2	1 1	0 1	0 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	2 Dokumen	4,575,523, 126	3 dokumen		1 Dokumen	2,000,523, 184	1 Dokumen	1,625,518, 687	1 Dokumen	81. 25	4	1,625,518, 687	200	35. 53
0 3	1 2	1 1	0 1	0 2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	3 dokumen	4,848,294, 709	-		1 Dokumen	1,273,295, 567	1 Dokumen	1,115,596, 250	1 Dokumen	87. 61	1	1,115,596, 250	33.3 3	23. 01

					Penetapan RRTR Provinsi	Penetapan RRTR Provinsi												
0 3	1 2	1 0	0 1	0 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	4 dokumen	5,299,485,919	1 Dokumen	316,824,200	1 Dokumen	199,486,543	1 Dokumen	179,469,600	1 Dokumen	89.97	496,293,800	9.36
0 3	1 2	1 0	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi													
0 3	1 2	1 0	0 3	0 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 dokumen	513,378,266	1 dokument	213,868,800	1 Dokumen	213,378,266	1 Dokumen	189,215,800	1 Dokumen	88.68	403,084,600	78.52
0 3	1 2	1 0	0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi													
0 3	1 2	1 0	0 4	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	4 dokumen	2,895,637,650	1 Dokumen		1 Dokumen	220,637,950	1 Dokumen	184,754,050	1 Dokumen	83.74	184,754,050	6.38
0 3	1 2	1 0	0 4	0 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Laporan	423,838,920	1 Laporan		1 Laporan	211,338,920	1 Laporan	203,984,750	1 Dokumen	96.52	203,984,750	48.13

					Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang															
0 3	1 2	1 2	0 4	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dok ume n	949,835,8 70	-		1 Dok ume n	199,835,8 70	1 Doku men	165,243,9 00	1 Dokume n	82. 69	1	165,243,9 00	25	17. 40
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR															
1 0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
1 0	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI															
1 0	0 2	1 2	0 1	1 1	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
1 0	0 2	1 2	0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan	Jumlah izin rekomendasi teknis yang di terbitkan	2 izin	402,584,4 00	0	-	2 Izin	402,584,4 00	2 Izin	296,144,5 00	1 izin	73. 56	2	296,144,5 00	100	73. 56

					DAERAH PROVINSI															
02	02	11	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
02	02	11	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	452 orang	43,963,903,008	0	-	226 ASN	22,623,757,546	226 ASN	19,730,271,183	1 ASN	87.21	226	19,730,271,183	50	44.88
02	02	11	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	474,000,000	0	-	1 Dokumen	474,000,000	1 Dokumen	474,000,000	1 Dokumen	100.00	1	474,000,000	100	100.00
02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
02	03	11	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah															
02	03	11	01	01	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 dokumen	2,619,040,547	1 Dokumen	405,121,099	1 Dokumen	475,291,198	1 Dokumen	353,280,411	1 Dokumen	74.33	2	758,401,510	33.3	28.96

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1 : Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			40%	41,7%	41,6%	41,16%	15,95%	41,7%	41,6%	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanpantai di WS Kewenangan provinsi			57%	56,88%	56,88%	56,88%	1,16%	56,88%	56,88%	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi			42,33%	53,29%	53,29%	53,29%	54%	53,29%	53,29%	
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			20%	50%	75%	100%	400%	50%	75%	
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional			20%	50%	75%	100%	500%	50%	75%	
6	Rasio kemantapan Jalan			62,58%	64,58%	66,58%	70,58%	61,4%	64,58%	66,58%	
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			6%	12%	18%	20%	70%	12%	18%	

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh dinas pupr provinsi Maluku dengan menggunakan metode analisis SWOT, guna mengukur capaian kinerja dan analisis lingkungan strategis, maka didapatkan beberapa permasalahan umum OPD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
5. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan
6. Masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan Kanal Passo (Direktif Menteri PUPR);
2. Dukungan terhadap pengembangan Kawasan Strategis RPJMN 2020-2024:
 - Dukungan infrastruktur pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Maluku Tengah
 - Dukungan infrastruktur Kawasan PKSN Saumlaki
 - Dukungan Infrastruktur pengembangan Kawasa Transmigrasi/Kawasan Perkotaan Baru Kobisonta di Kab Maluku Tengah
3. Penguatan sistem perkotaan nasional PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki dan PKSN Dobo melalui dukungan pengembangan infrastruktur;
4. Dukungan infrastruktur terhadap PSN (Proyek Strategis Nasional) lanjutan berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PR 0102 Mn/ 145 Tahun2020:
 - Penyelesaian dan tindak lanjut jaringan irigasi Bendungan Way Apu, Kab. Buru (Pembebasan Lahan)
 - Penuntasan 7 Ruas Jalan Trans Maluku:
 - Ibra - Danar - Tetoat (P. Kei Kecil) = 97,76%
 - Kairatu – Piru – Taniwel - Lisabata - Saleman (P. Seram)
 - Laha – Alang – Wakasihu – Assilulu – Keitetu – Hitu – Morella - Liang (P. Ambon)
 - Haya – Tehoru – Laimu – Werinama - Kotabaru - Air Nanang (P. Seram)

- Air Nanang – Masiwang – Wolu – Dawang – Bula (P. Seram)
 - Leksula - Namrole (P. Buru) - Tual – Ngadi – Tamedan - Ohoitu (P. Tual)
5. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2021:
- Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional - Pulau Ambon (Program Lumbung Ikan Nasional / LIN)
 - Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) (P. Seram, P. Buru, P. Wetar, P. Moa, P. Babar, P. Selaru, P. Aru, dan P. Kei Besar)
 - Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak & Aman (90% Rumah Tangga)
 - Akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

TABEL REVIEW RENJA 2022 TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	895,345,150	Provinsi Maluku	1 Dokumen	895,345,150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	800,000,000	Provinsi Maluku	1 Laporan	800,000,000
Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	367,608,553	Provinsi Maluku	1 Laporan	367,608,553
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Provinsi Maluku		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	200,000,000	Provinsi Maluku	1 Dokumen	200,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	294,437,605	Provinsi Maluku	19 Orang	294,437,605
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	Provinsi Maluku	3 Paket	100,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Provinsi Maluku		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158,911,900	Provinsi Maluku	1 Paket	158,911,900

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Provinsi Maluku		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	Provinsi Maluku	20 Dokumen	20 Dokumen
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Provinsi Maluku		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	100,033,000	Provinsi Maluku	40 Laporan	100,033,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	900,000,000	Provinsi Maluku	70 Laporan	900,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Maluku	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,471,157,521	Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,471,157,521
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Provinsi Maluku		
Pengadaan Mebel	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	239,272,835	Provinsi Maluku	4 Paket	239,272,835
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	156,772,900	Provinsi Maluku	10 Unit	156,772,900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	464,400,000	Provinsi Maluku	3 Laporan	464,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160 Orang	4,986,400,000	Provinsi Maluku	160 Orang	4,986,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Provinsi Maluku		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	500,000,000	Provinsi Maluku	15 Unit	500,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Maluku	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Provinsi Maluku		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Provinsi Maluku	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Provinsi Maluku		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	100,000,000	Provinsi Maluku	8 Unit	100,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Provinsi Maluku		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	352,500,000	Provinsi Maluku	1 Unit	352,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Provinsi Maluku		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun			Provinsi Maluku		
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Provinsi Maluku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun			Provinsi Maluku		
Pembangunan Tanggul Sungai	Provinsi Maluku	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1987 M	19,871,468,71 9	Provinsi Maluku	1987 M	19,871,468,7 19
Pembangunan Tanggul Sungai (Pembayaran Lanjut)	Provinsi Maluku	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			Provinsi Maluku		
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Provinsi Maluku	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	124.48 M	1,033,948,443	Provinsi Maluku	124.48 M	1,033,948,44 3
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Provinsi Maluku	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	4157.17 M	24,544,273,69 3	Provinsi Maluku	4157.17 M	24,544,273,6 93
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Provinsi Maluku	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			Provinsi Maluku		
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi			Provinsi Maluku		
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	1,815,000,000	Provinsi Maluku	2 Lembaga	1,815,000,00 0
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Provinsi Maluku		0 KM	132,000,000	Provinsi Maluku	0 KM	132,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Provinsi Maluku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			Provinsi Maluku		
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Provinsi Maluku	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	66.12 Ha	66.12 Ha	Provinsi Maluku	66.12 Ha	66.12 Ha

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Provinsi Maluku	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	66.12 Ha	3,767,699,900	Provinsi Maluku	66.12 Ha	3,767,699,900
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Provinsi Maluku	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 M/DI	600,000,000	Provinsi Maluku	8 M/DI	600,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Provinsi Maluku	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1%	500,000,000	Provinsi Maluku	1%	500,000,000
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Provinsi Maluku		0 Liter/Detik	17,865,000,000	Provinsi Maluku	0 Liter/Detik	17,865,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000,000	Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,000,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Provinsi Maluku	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15 Unit	3,335,000,00	Provinsi Maluku	15 Unit	3,335,000,00
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan (Pembayaran Lanjut)	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	31 Unit	13,782,500,00	Provinsi Maluku	31 Unit	13,782,500,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	17 Unit	16,390,000,00	Provinsi Maluku	17 Unit	16,390,000,00
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	24 Unit	32,340,000,00	Provinsi Maluku	24 Unit	32,340,000,00

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	2,280,296,160	Provinsi Maluku	1 Dokumen	2,280,296,160
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Maluku	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1,000,000,000	Provinsi Maluku	1 Kawasan	1,000,000,000
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Maluku	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	24 Unit	30,723,000,000	Provinsi Maluku	24 Unit	30,723,000,000
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	110,000,000	Provinsi Maluku	1 Dokumen	110,000,000
ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	3,808,267,870	Provinsi Maluku	1 Dokumen	3,808,267,870
Pembangunan Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Dibangun	4.77 KM	11,000,000,000	Provinsi Maluku	4.77 KM	11,000,000,000
Pembangunan Jalan (Pembayaran Lanjut)	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Dibangun			Provinsi Maluku		
Rekonstruksi Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6.94 KM	20,285,865,500	Provinsi Maluku	6.94 KM	20,285,865,500
Rehabilitasi Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	11 KM	500,000,000	Provinsi Maluku	11 KM	500,000,000
Rehabilitasi Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			Provinsi Maluku		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0.89 KM	1,145,957,670	Provinsi Maluku	0.89 KM	1,145,957,670
Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi Maluku	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.77 KM	1.77 KM	Provinsi Maluku	1.77 KM	1.77 KM
Pembangunan Jembatan	Provinsi Maluku	Panjang Jembatan yang Dibangun	15.89 M	11,551,954,523	Provinsi Maluku	15.89 M	11,551,954,523
Pembangunan Jembatan (Luncur)	Provinsi Maluku	Panjang Jembatan yang Dibangun			Provinsi Maluku		
Rehabilitasi Jembatan	Provinsi Maluku	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	127.31 M	642,176,370	Provinsi Maluku	127.31 M	642,176,370
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Provinsi Maluku		1 Dokumen	1,574,331,220	Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,574,331,220
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Provinsi Maluku	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	35 Orang	330,000,000	Provinsi Maluku	35 Orang	330,000,000

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi Maluku	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	210 Orang	1,100,000,000	Provinsi Maluku	210 Orang	1,100,000,000
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi Maluku	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	130 Orang	550,000,000	Provinsi Maluku	130 Orang	550,000,000
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Provinsi Maluku	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	175 Orang	275,000,00	Provinsi Maluku	175 Orang	275,000,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	200,000,000	Provinsi Maluku	1 Laporan	200,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAK	Provinsi Maluku	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	27 Orang	200,000,000	Provinsi Maluku	27 Orang	200,000,000
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	1,950,000,000	Provinsi Maluku	1 Laporan	1,950,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	1 Dokumen	3,074,999,542	Provinsi Maluku	1 Dokumen	3,074,999,542
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1,699,999,792	Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,699,999,792
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Sistem Informasi Penataan Ruang	Provinsi Maluku	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			Provinsi Maluku		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Provinsi Maluku	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	724,999,900	Provinsi Maluku	1 Dokumen	724,999,900
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Provinsi Maluku	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			Provinsi Maluku		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	250,000,000	Provinsi Maluku	1 Dokumen	250,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		

Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(9)	(2)					
Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah izin rekomendasi teknis yang diterbitkan			Provinsi Maluku		
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Provinsi Maluku		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
KEUANGAN	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226 Orang/ Bulan	21,340,145,46 2	Provinsi Maluku	226 Orang/ Bulan	21,340,145,4 62
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Provinsi Maluku		

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Maluku				Provinsi Maluku		
Penyusunan Standar Harga	Provinsi Maluku	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	527,936,790	Provinsi Maluku	1 Dokumen	527,936,790

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dantanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kasupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *topdown*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi danjaminan bahwa paling sedikit 30 % dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD aturan tersebut tercantum dalam Perrmendagri 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Maluku

Berdasarkan dokumen RPJMD Maluku 2019 - 2024, visi Kepala Daerah (KDH) adalah: “*Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan*”. Upaya untuk mewujudkan visiini adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

1. Birokrasi yang akomodatif, Komunikatif, Koordinatif, Kolaboratif, serta bersih dan melayani
2. Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau
3. Industrialisasi sumber daya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM)
4. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas gugus pulau
5. Optimalisasi Industri Pertanian dan Perikanan
6. Keamanan untuk investasi dan pariwisata
7. Pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi
8. Pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku
9. Jaminan layanan kesehatan merata berkualitas dan gratis

Tema pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah “***Pemantapan Ekonomi yang Inklusif Melalui Peningkatan Produktifitas dan Penguatan Sumber Daya Manusia***” yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance
2. Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan
3. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan
4. Percepatan pengentasan kemiskinan
5. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas
7. Peningkatan ketahanan social budaya masyarakat dan daya saing pariwisata
8. Pengembangan usaha ekonomi kreatif
9. Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi yang handal untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Sakip OPD
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Infrastruktur dalam mendukung Ketahanan Pangan.	Luas fungsional Daerah Irigasi
		Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan banjir dan Abrasi.	Panjang DAS dan Pesisir Pantai yang tertangani
		Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas secara optimal dan merata	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan kondisi baik	Persentase penduduk berakses air minum
		Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan struktur dan pola ruang	Kemantapan Jalan Provinsi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga ahli konstruksi yang berdaya saing	Ketaatan terhadap RTRW
			Jumlah SDM yang tersertifikasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPROVINSI MALUKU TAHUN 2021

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Pemerintah yang Mendukung Prioritas Provinsi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Prioritas Infrastruktur Dasar
 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah Sedangkan Program/Kegiatan Lain yang merupakan Prioritas Daerah adalah :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 5. Program Pengembangan Permukiman
 6. Program Penataan Bangunan Gedung
 7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

RENCANA KERJA DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

Kode			PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023			CATATA N PENTIN G	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2024
						Lokasi	Target	PAGU PROGRAM		
						Kab/Kota				
1			2	3	4	5	6	7	8	9
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				279,218,832,702.00		279,218,832,702.00
01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				278,690,895,912.00		278,690,895,912.00
01	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				34,026,985,076.00		34,026,985,076.00
01	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,195,345,150.00		2,195,345,150.00
01	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PROV	1 Dokumen	895,345,150.00	895,345,150.00
01	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PROV	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00
01	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PROV	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00

01	03	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PROV	1 Dokumen	100,000,000.00		100,000,000.00
01	03	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PROV	1 Dokumen	100,000,000.00		100,000,000.00
01	03	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PROV	1 Dokumen	100,000,000.00		100,000,000.00
01	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROV	1 Laporan	800,000,000.00		800,000,000.00
01	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21,340,145,462.00		21,340,145,462.00
01	03	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PROV	226 Orang/Bulan	21,340,145,462.00		21,340,145,462.00
01	03	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				367,608,553.00		367,608,553.00

01	03	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PROV	1 Laporan	367,608,553.00		367,608,553.00
01	03	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				494,437,605.00		494,437,605.00
01	03	01	1.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PROV	1 Dokumen	200,000,000.00		200,000,000.00
01	03	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PROV	19 Orang	294,437,605.00		294,437,605.00
01	03	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,858,945,050.00		2,858,945,050.00
01	03	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PROV	3 Paket	100,000,000.00		100,000,000.00
01	03	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PROV	1 Paket	158,911,900.00		158,911,900.00
01	03	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PROV	20 Dokumen	100,000,150.00		100,000,150.00
01	03	01	1.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PROV	40 Laporan	100,033,000.00		100,033,000.00

01	03	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PROV	70 Laporan	900,000,000.00		900,000,000.00
01	03	01	1.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PROV	1 Dokumen	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
01	03	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				531,772,900.00		531,772,900.00
01	03	01	1.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	PROV	1 Paket	375,000,000.00		375,000,000.00
01	03	01	1.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PROV	10 Unit	156,772,900.00		156,772,900.00
01	03	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,450,800,000.00		5,450,800,000.00
01	03	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sambungan Jasa Penunjang Perkantoran	PROV	3 Laporan	464,400,000.00		464,400,000.00
01	03	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	PROV	160 Orang	4,986,400,000.00		4,986,400,000.00
01	03	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,050,000,000.00		1,050,000,000.00

01	03	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	PROV	15 Unit	500,000,000.00		500,000,000.00
01	03	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PROV	8 Unit	100,000,000.00		100,000,000.00
01	03	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PROV	1 Unit	450,000,000.00		450,000,000.00
01	03	02				POGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				61,513,089,856.00		61,513,089,856.00
01	03	02	1.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				47,396,690,855.00		47,396,690,855.00
01	03	02	1.01	09		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Terbangun		1987 M	19,871,468,719.00		19,871,468,719.00
01	03	02	1.01	10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		124.48 M	1,033,948,443.00		1,033,948,443.00
01	03	02	1.01	18		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		4157.17 M	24,544,273,693.00		24,544,273,693.00

01	03	02	1.01	61		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		2 Lembaga	1,815,000,000.00		1,815,000,000.00
01	03	02	1.01	65		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara		0 KM	132,000,000.00		132,000,000.00
01	03	02	1.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				14,450,000,000.00		14,450,000,000.00
01	03	02	1.02	08		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Fungsional Irigasi yang ditingkatkan		75.00 Ha	9,850,000,000.00		9,850,000,000.00
01	03	02	1.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Direhab		2500.50 M	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
01	03	02	1.02	21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara		8 M/DI	600,000,000		600,000,000
01	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				18,365,000,000.00		18,865,000,000.00
01	03	03	1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				18,365,000,000.00		18,365,000,000.00
01	03	03	1.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM		1%	500,000,000.00		500,000,000.00

01	03	03	1.01	03		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional		0 Liter/Detik	17,865,000,000.00		17,865,000,000.00
01	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
01	03	04	1.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
01	03	04	1.01	07		Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Kegiatan Kalesang Negeri		1 Dokumen	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
01	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3,335,000,000.00		3,335,000,000.00
01	03	06	1.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				3,335,000,000.00		3,335,000,000.00
01	03	06	1.01	04		Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan		15 Unit	3,335,000,000.00		3,335,000,000.00
01	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				13,782,500,000.00		13,782,500,000.00
01	03	07	1.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				13,782,500,000.00		13,782,500,000.00

01	03	07	1.01	01		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		31 Unit	13,782,500,000.00		13,782,500,000.00
01	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				48,730,000,000.00		48,730,000,000.00
01	03	08	1.01			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				48,730,000,000.00		48,730,000,000.00
01	03	08	1.01	01		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		17 Unit	16,390,000,000.00		16,390,000,000.00
01	03	08	1.01	02		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		24 Unit	32,340,000,000.00		32,340,000,000.00
01	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				34,113,296,160.00		34,113,296,160.00
01	03	09	1.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				34,113,296,160.00		34,113,296,160.00

01	03	09	1.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	2,280,296,160.00		2,280,296,160.00
01	03	09	1.01	02		Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		1 Kawasan	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
01	03	09	1.01	03		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang ditata		24 Unit	30,723,000,000.00		30,723,000,000.00
01	03	09	1.01	07		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 Dokumen	110,000,000.00		110,000,000.00
01	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				52,874,354,943.00		52,874,354,943.00
01	03	10	1.01			Penyelenggaraan Jalan Provinsi				52,874,354,943.00		52,874,354,943.00

01	03	10	1.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		1 Dokumen	3,808,267,870.00		3,808,267,870.00
01	03	10	1.01	05		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		4.77 KM	11,000,000,000.00		11,000,000,000.00
01	03	10	1.01	08		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		6.94 KM	20,285,865,500.00		20,285,865,500.00
01	03	10	1.01	09		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		11 KM	500,000,000.00		500,000,000.00
01	03	10	1.01	10		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		0.89 KM	1,145,957,670.00		1,145,957,670.00
01	03	10	1.01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		1.77 KM	2,365,801,790.00		2,365,801,790.00
01	03	10	1.01	12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		15.89 M	11,551,954,523.00		11,551,954,523.00
01	03	10	1.01	18		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		127.31 M	642,176,370.00		642,176,370.00
01	03	10	1.01	22		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		1 Dokumen	1,574,331,220.00		1,574,331,220.00
01	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4,605,000,000.00		4,605,000,000.00

01	03	11	1.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				2,255,000,000.00		2,255,000,000.00
01	03	11	1.01	02		Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor /Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	PROV	35 Orang	330,000,000.00		330,000,000.00
01	03	11	1.01	04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli yang Kompeten	PROV	210 Orang	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
01	03	11	1.01	06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi	PROV	130 Orang	550,000,000.00		550,000,000.00
01	03	11	1.01	07		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	PROV	175 Orang	275,000,000.00		275,000,000.00
01	03	11	1.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				400,000,000.00		400,000,000.00
01	03	11	1.02	01		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	PROV	1 Laporan	200,000,000.00		200,000,000.00
01	03	11	1.02	03		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	PROV	27 Orang	200,000,000.00		200,000,000.00

01	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				1,950,000,000.00		1,950,000,000.00
01	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PROV	1 Laporan	1,950,000,000.00		1,950,000,000.00
01	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5,749,999,234.00		5,749,999,234.00
01	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				4,774,999,334.00		4,774,999,334.00
01	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	PROV	1 Dokumen	3,074,999,542.00		3,074,999,542.00
01	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	PROV	1 Dokumen	1,699,999,792.00		1,699,999,792.00
01	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi				974,999,900.00		974,999,900.00
01	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	PROV	1 Dokumen	724,999,900.00		724,999,900.00

01	03	12	1.04	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PROV	1 Dokumen	250,000,000.00		250,000,000.00
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	02					KEUANGAN				527,936,790.00		527,936,790.00
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				527,936,790.00		527,936,790.00
5	02	03	1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah				527,936,790.00		527,936,790.00
5	02	03	1.01	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	PROV	1 Dokumen	527,936,790.00		527,936,790.00
TOTAL									279,218,832,702.00		279,218,832,702.00	
Kode			PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023			CATATA N PENTING	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2024		
						Lokasi	Target	PAGU PROGRAM				
1	2	3	4	5	6	7			8	9		
					UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN				1,084,475,580.00		1,084,475,580.00	

1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1	03	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164,270,150.00		164,270,150.00
1	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROV	1 Laporan	164,270,150.00	164,270,150.00
1	03	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			76,646,830.00		76,646,830.00
1	03	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PROV	5 Laporan	6,714,300.00	6,714,300.00
1	03	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PROV	1 Paket	60,192,530.00	60,192,530.00
1	03	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PROV	5 Dokumen	9,740,000.00	9,740,000.00
1	03	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			668,880,000.00		668,880,000.00

1	03	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PROV	3 Laporan	52,320,000.00		52,320,000.00
1	03	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	PROV	20 Orang	616,560,000.00		616,560,000.00
1	03	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174,678,600.00		174,678,600.00
1	03	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PROV	4 Unit	66,920,000.00		66,920,000.00
1	03	01	1.09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	PROV	4 Unit	50,000,000.00		50,000,000.00
1	03	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PROV	6 Unit	57,758,600.00		57,758,600.00
TOTAL PAGU										279,775,371,492.00		279,775,371,492.00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2023. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, disamping juga menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang lalu.

Besar harapan kami adanya pengalokasian anggaran yang cukup sehingga target yang sudah ditetapkan dalam dokumen-dokumen rencana dapat terealisasi dengan maksimal sehingga dampak dan pembangunan tersebut bisa dirasakan langsung oleh setiap lapisan masyarakat.

Ambon, Agustus 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

DR. MUHAMAT MARASABESSY, ST, M.Tech
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19671104 199803 1 005